



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ANTISIPASI BENCANA KEKERINGAN AKIBAT FENOMENA CUACA PANAS TERIK

Dewi Restu Mangeswuri

Analisis Legislatif Ahli Muda
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sepekan terakhir ini, sebagian wilayah Indonesia mengalami fenomena suhu panas yang cukup terik pada siang hari. Berdasarkan data hasil pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), suhu maksimum pada siang hari terukur selama periode tanggal 22 - 29 September 2023 di beberapa wilayah Indonesia berkisar antara 35 - 38°C. Secara umum, fenomena suhu panas terik tersebut dipicu oleh beberapa kondisi dinamika atmosfer. Salah satunya yaitu saat ini kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia terutama di Jawa hingga Nusa Tenggara (termasuk Jabodetabek) didominasi oleh kondisi cuaca yang cerah dan sangat minimnya tingkat pertumbuhan awan pada siang hari. Kondisi ini tentunya menyebabkan penyinaran matahari pada siang hari ke permukaan bumi tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di atmosfer sehingga suhu pada siang hari di luar ruangan terasa sangat terik.

Faktor-faktor lain seperti kecepatan angin, tutupan awan, dan tingkat kelembapan udara juga memiliki dampak yang besar terhadap kondisi suhu terik di suatu wilayah seperti yang terjadi saat ini di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi fenomena panas terik ini diprediksi akan berlangsung dalam bulan Oktober ini sehingga BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kondisi stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar tidak terjadi dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya.

BMKG menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia, terutama yang berada di selatan ekuator, masih mengalami musim kemarau. Kemarau panjang yang melanda tanah air membuat sejumlah daerah mengalami kekeringan ekstrem. Lahan pertanian yang gagal panen hingga kebutuhan air bersih masyarakat yang mulai tak tercukupi menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi secara serius. Luas lahan pertanian yang mengalami kerusakan secara kumulatif di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, hingga pertengahan bulan September 2023 telah mencapai 106 hektare (ha). Lahan pertanian yang mengalami kerusakan ini tersebar di 10 wilayah kecamatan, yang meliputi Tenganan, Pringapus, Pabelan, Kaliwungu, Susukan, Banyubiru, Bawen, Bergas, Bringin, dan Kecamatan Ambarawa. Wilayah kecamatan dengan jumlah kerusakan lahan pertanian terparah berada di Kecamatan Pabelan dengan luas mencapai 30 ha (2 ha rusak berat dan 28 ha tidak mengeluarkan hasil/puso).

Kekeringan parah juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengakibatkan kebutuhan air bersih warga tidak tercukupi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat sudah ada 21 kecamatan di DIY yang saat ini terdampak bencana kekeringan. Kekeringan yang meluas menyebabkan masyarakat kekurangan air bersih. Saat ini, krisis air bersih melanda 14.325 keluarga atau 46.329 jiwa di Banyumas. Di Jawa Barat, krisis air bersih melanda tiga desa di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Musim kemarau panjang membuat sumur milik warga di tiga desa tersebut mengering akibat tidak turunnya hujan. BPBD Lamongan, Jawa Timur, juga mencatat tujuh kecamatan terdampak kekeringan. BPBD terus mengirimkan air bersih sebanyak 67 tangki atau 354 ribu liter air untuk dibagikan kepada 2.980 keluarga atau 11.243 jiwa yang mengalami krisis air bersih di tujuh kecamatan tersebut.

Atensi DPR

Fenomena cuaca panas terik dan kekeringan air bersih yang melanda tanah air perlu segera diantisipasi dan dimitigasi. Kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat dan irigasi lahan pertanian. Komisi V DPR RI memiliki peran penting untuk mendorong pemerintah menanggulangi bencana kekeringan yang terjadi di tanah air dan mengawal pembangunan infrastruktur khususnya dalam mencegah dampak kekeringan, seperti pembangunan bendungan, saluran irigasi pertanian, dan reservoir air. Komisi V DPR RI perlu mengawasi dan memastikan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan tindakan penanggulangan bencana kekeringan saja, tetapi juga harus memerhatikan tindakan pencegahannya.

Sumber

bmkg.go.id, 30 September 2023;
Media Indonesia, 26 September 2023; dan
nasional.tempo.co, 30 September 2023;



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023